

Katalog : 7203003.63



# **STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN SELATAN 2017 - 2018**



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



<https://kes>

**STATISTIK KEUANGAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
DI KALIMANTAN SELATAN 2017 - 2018**

# **STATISTIK KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KAB/KOTA DI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2017 - 2018**

ISSN. 2460 - 3031

No. Publikasi: 63.540.1807

Katalog BPS: 7203003.63

Ukuran Buku: 29,7 x 21,5 cm

Jumlah Halaman: vi dan 48 Halaman

Gambar Kulit:

Bidang Statistik Distribusi

Naskah:

Bidang Statistik Distribusi

Diterbitkan Oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan

Dicetak Oleh:

CV. Karya Bintang Muslim

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

<https://kalsel.bps.go.id>

# KATA PENGANTAR

---

Puji syukur patut dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa dengan selesainya publikasi **“Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Kalimantan Selatan Tahun 2017 – 2018”**. Publikasi ini diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan dan merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya.

Data yang disajikan dalam publikasi ini memuat data realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2017 dan data anggaran tahun 2018. Data tersebut merupakan hasil kompilasi data yang diterima dari Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota melalui BPS daerah.

Dalam publikasi ini disertakan pula penjelasan tentang konsep definisi dan metode pengumpulan data guna mempermudah pemahaman para pemakai data. Semoga publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan para konsumen data, baik untuk keperluan perencanaan dan analisis maupun evaluasi perkembangan perekonomian secara umum.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa publikasi ini masih jauh dari sempurna dan belum mencukupi kebutuhan pemakai secara maksimal. Oleh karena itu, kritik dan saran pengguna data sangat diperlukan guna penyempurnaan publikasi pada masa yang akan datang.

Banjarbaru, Agustus 2019

Kepala Badan Pusat Statistik  
Provinsi Kalimantan Selatan

**Ir. Diah Utami. M.Sc**

# DAFTAR ISI

	HALAMAN
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
1. PENJELASAN UMUM .....	1
1.1 PENDAHULUAN.....	1
1.2 RUANG LINGKUP SURVEI.....	1
1.3 KONSEP DAN DEFINISI .....	1
2. ULASAN RINGKAS .....	9
2.1 KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA.....	9
2.2 PENERIMAAN DAERAH .....	12
2.3 PENGELUARAN DAERAH.....	15
3. LAMPIRAN .....	19

# DAFTAR TABEL

	HALAMAN
TABEL a. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA 2017-2018 .....	11
TABEL b. DISTRIBUSI REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA MENURUT JENIS PENERIMAAN 2017-2018 .....	13
TABEL c. DISTRIBUSI PERSENTASE REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA MENURUT JENIS PENGELUARAN 2017-2018..	16

<https://kalsel.bps.go.id>



# 1. PENJELASAN UMUM

---

## 1.1. Pendahuluan

Publikasi Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota diterbitkan Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Publikasi tahun ini menyajikan data realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2017, serta anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2018. Publikasi ini disajikan untuk memenuhi kebutuhan terhadap data keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota terutama untuk melihat potensi daerah dari sisi penerimaan dan pengeluaran yang bisa dipakai untuk membuat kebijakan yang rinci dan tepat sasaran.

## 1.2. Ruang Lingkup Survei

Data pendapatan dan belanja kabupaten/kota dikumpulkan dari Bagian Keuangan Kantor Bupati/Walikota Kepala Daerah Kabupaten/Kota di tiap-tiap kabupaten/kota.

## 1.3. Konsep dan Definisi

Daftar isian keuangan daerah kabupaten/kota (K-2) digunakan untuk mencatat data statistik keuangan menyangkut realisasi penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam daftar isian tersebut terdapat beberapa konsep dan definisi yang terkait dengan struktur laporan keuangan kabupaten/kota yang sudah baku. Berikut ini beberapa penjelasan konsep dan definisi dalam daftar isian K2.

### 1.3.1. Penerimaan Daerah

Penerimaan daerah dalam struktur laporan keuangan kabupaten/kota, secara umum terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan.

Pendapatan Daerah bersumber dari :

1. Pendapatan Asli daerah
2. Dana Perimbangan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

**Pendapatan Asli Daerah (PAD)** adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan untuk mengumpulkan dana guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya. PAD terdiri dari pajak



daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

**Pajak Daerah** adalah pungutan yang dilakukan Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pajak daerah ini dapat dibedakan dalam dua kategori yaitu pajak daerah yang ditetapkan oleh peraturan daerah dan pajak Negara yang pengelolaan dan penggunaannya diserahkan kepada daerah. Penerimaan pajak daerah antara lain pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, galian gol C, parkir dan lain-lain.

**Retribusi Daerah** adalah pungutan daerah sebagai pembiayaan atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perijinan tertentu. Retribusi jasa umum meliputi retribusi pelayanan kesehatan, persampahan/kebersihan, biaya KTP dan akte catatan sipil, pelayanan pemakaman, pelayanan parkir tepi jalan umum, pasar, pengujian kendaraan bermotor, pemeriksaan alat pemadam kebakaran, penggantian biaya cetak peta, dan retribusi pelayanan pendidikan. Retribusi jasa usaha mencakup retribusi pemakaian kekayaan daerah, pasar grosir/pertokoan terminal, rumah potong hewan, tempat rekreasi/olahraga dan sejenisnya. Retribusi perizinan tertentu meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, ijin peruntukan penggunaan tanah, ijin trayek dan lain-lain.

**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** merupakan pendapatan yang berupa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik pemerintah/BUMN dan bagian laba atas penyertaan modal/investasi pada perusahaan milik swasta.

**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** merupakan pendapatan daerah yang terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga, penerimaan ganti rugi atas kekayaan daerah (TGR), komisi, potongan dan keuntungan selisih nilai tukar rupiah, denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, denda pajak, denda retribusi, hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan fasilitas umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan, dan lain-lain.

**Dana Perimbangan** adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

**Bagi Hasil Pajak** adalah bagian daerah yang berasal dari pendapatan pajak bumi dan bangunan (PBB), pendapatan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak penghasilan (PPH) Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, Pasal 21 orang pribadi (termasuk PPh pasal 21), dan lain-lain.

**Bagi Hasil Bukan Pajak** merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pendapatan iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya alam kehutanan, dana reboisasi, pungutan pengusahaan perikanan dan hasil perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pertambangan panas bumi.

**Dana Alokasi Umum (DAU)** adalah transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk menutup kesenjangan fiskal (fiskal gap) dan pemerataan kemampuan fiskal antar daerah dalam rangka membantu kemandirian pemerintah daerah menjalankan fungsi dan tugasnya melayani masyarakat.

**Dana Alokasi Khusus (DAK)** adalah dana yang disediakan kepada daerah untuk memenuhi kebutuhan khusus. Ada tiga kriteria dari kebutuhan khusus seperti ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu :

- Kebutuhan tidak dapat diperhitungkan dengan menggunakan rumus DAU
- Kebutuhan merupakan komitmen atau prioritas nasional
- Kebutuhan untuk membiayai kegiatan reboisasi dan penghijauan oleh daerah penghasil.

Dengan demikian DAK pada dasarnya merupakan transfer yang bersifat spesifik untuk tujuan-tujuan yang sudah digariskan.

**Lain-lain Pendapatan yang Sah** adalah pendapatan lainnya dari Pemerintah Pusat dan atau dari Instansi Pusat, serta dari daerah lainnya. Lain-lain pendapatan yang sah terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

### 1.3.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah terdiri dari :

1. Belanja tak langsung
2. Belanja langsung

## **Belanja Tak Langsung**

Adalah bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari : belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang - undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak terduga.

**Belanja Pegawai** adalah belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Termasuk disini uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

**Belanja Bunga** adalah belanja yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung berdasarkan kewajiban pokok utang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

**Belanja Subsidi** adalah belanja yang telah dianggarkan dan digunakan untuk bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu, agar harga jual produksi barang/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Tentunya perusahaan/lembaga tersebut menghasilkan produk atau jasa untuk pelayanan masyarakat umum.

**Belanja Hibah** adalah belanja yang telah dianggarkan untuk diberikan kepada pihak lain sebagai hibah dalam bentuk uang, barang dan atau jasa. Hibah dapat diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, pemerintah desa, perusahaan daerah/BUMN/BUMD, Badan/Lembaga/Organisasi Swasta, ataupun kelompok masyarakat/perorangan.

**Belanja Bantuan Sosial** adalah belanja yang telah dianggarkan untuk memberikan bantuan kepada organisasi kemasyarakatan, partai politik dan yang lainnya bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

**Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa** adalah belanja yang telah dianggarkan sebagai dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan kabupaten/kota kepada provinsi, kabupaten/kota, kepada desa, atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil ini terdiri dari :

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah provinsi

- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil pajak daerah kepada pemerintah desa
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah kabupaten/kota
- Belanja bagi hasil retribusi daerah kepada pemerintah desa

**Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa** adalah pemberian bantuan yang bersifat umum atau khusus dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah provinsi, kepada pemerintah desa, atau pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan. Bantuan keuangan yang bersifat umum, peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah/pemerintah desa penerima bantuan. Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.

Bantuan keuangan ini terdiri dari :

- Bantuan keuangan kepada pemerintah provinsi
- Bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota
- Bantuan keuangan kepada pemerintah desa
- Bantuan keuangan kepada pemerintah daerah/pemerintah desa lainnya

**Belanja Tidak Terduga** adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

**Belanja Langsung** adalah bagian belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

**Belanja Pegawai** adalah pengeluaran untuk honorarium/upah, lembur dan pengeluaran lain untuk meningkatkan motivasi dan kualitas pegawai dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

**Belanja Barang dan Jasa** adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya yang kurang dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Pembelian/pengadaan barang dan jasa yang dimaksud meliputi bahan pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan

bermotor, cetak dan penggandaan, sewa gedung, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atribut, pakaian kerja, pakaian khusus hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan pindah tugas, pemulangan pegawai dan lain-lain belanja barang dan jasa.

**Belanja Modal** adalah pengeluaran yang digunakan untuk pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang nilai manfaatnya lebih dari setahun, dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembentukan aset tersebut meliputi pengadaan tanah, alat-alat berat, alat-alat angkutan, alat-alat bengkel, alat-alat pertanian, peralatan dan perlengkapan kantor, komputer, mebeulair, peralatan dapur, penghias ruangan, alat-alat studio, alat-alat komunikasi, alat-alat ukur, alat-alat kedokteran, alat-alat laboratorium, konstruksi jalan, jembatan, jaringan air, penerangan jalan, taman dan hutan kota, instalasi listrik dan telepon, bangunan, buku/kepustakaan, barang seni, pengadaan hewan/ternak dan tanaman, serta persenjataan/keamanan.

### **I.3.3. Pembiayaan Daerah**

**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya** adalah bagian penerimaan anggaran yang didapat dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan lanjutan.

**Pencairan Dana Cadangan** adalah penerimaan daerah yang diperoleh dari pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

**Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** adalah semua penjualan aset milik pemerintah daerah yang dikerjasamakan oleh pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah daerah.

**Penerimaan Pinjaman Daerah** adalah semua penerimaan dari pinjaman daerah, termasuk penerimaan atas penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

**Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman** adalah semua penerimaan kembali dari pemberian pinjaman kepada pemerintah Pusat, Provinsi dan/atau pemerintah daerah lainnya.

**Pembentukan Dana Cadangan** adalah pengeluaran untuk membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.

**Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah** adalah pengeluaran daerah yang dialokasikan pada penyertaan modal/investasi pemerintah daerah, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, permanen atau non permanen. Investasi ini dapat berupa deposito berjangka, pembelian Surat Utang Negara (SUN), Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Perbendaharaan Negara (SPN), saham, penanaman modal pada BUMN/BUMD, pembelian obligasi dan surat utang jangka panjang.

**Pembayaran Pokok Utang** adalah pembayaran kewajiban atas pokok utang yang dihitung berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

**Pemberian Pinjaman Daerah** adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk pemberian kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau pihak ketiga.

**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan** merupakan hasil penjumlahan antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan neto. Surplus atau defisit anggaran merupakan selisih antara pendapatan daerah dengan belanja daerah, sedangkan antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.



## 2. ULASAN RINGKAS

---

### 2.1. Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Kebijakan pemerintah daerah dalam menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 merupakan gambaran langkah kongret pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik. Kebijakan tersebut harus mencerminkan langkah pemerintah daerah dalam memperbaiki mutu pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dituntut menjadi motor utama dalam menggerakkan perekonomian di daerahnya masing-masing agar dapat tumbuh terus dari tahun ke tahun. Dari data Produk Domestik Bruto atas dasar harga konstan tahun 2010 diketahui bahwa pada tahun 2018 perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 5,13 persen. Pertumbuhan ini lebih cepat jika dibandingkan dengan tahun 2017 dimana perekonomian Kalimantan Selatan tumbuh sebesar 5,28 persen.

Kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin meningkat mendorong pemerintah daerah untuk menaikkan belanja pemerintah. Untuk mengimbangnya, pemerintah mengupayakan peningkatan penerimaan daerah dengan memberikan perhatian kepada pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sumber-sumber PAD adalah hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. PAD harus dapat dikelola daerah agar sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah sehingga dalam upaya penggalian sumber pendapatannya pemerintah tidak mendistorsi perekonomian. Adanya kebijakan otonomi daerah yang memberikan keleluasaan kepada pemerintahan daerah dalam mengatur keuangan daerahnya, harus dapat dimanfaatkan dengan efektif dan efisien sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Sumber penerimaan yang masih menjadi sumber utama daerah untuk membiayai belanja daerah adalah dana alokasi umum (DAU). Dana transfer pemerintah pusat ini memiliki kontribusi terbesar dalam pendapatan daerah hingga mencapai lebih dari 50 persen. Sumber penerimaan yang lain adalah bagi hasil pajak dan bukan pajak, bagi hasil pajak dan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi, serta lain-lain pendapatan yang sah.

Penerimaan daerah sesuai dengan struktur laporan keuangan terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan. Penerimaan daerah dalam APBD 2018, jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan daerah tahun 2017 terjadi penurunan dari 18,755 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 18,562 triliun rupiah pada tahun 2018 atau turun sebesar 1,03 persen. Dari sisi pendapatan daerah,



terlihat adanya kenaikan sebesar 4,10 persen, yaitu dari 16,182 triliun rupiah pada tahun 2017 diperkirakan menjadi 16,846 triliun rupiah pada tahun 2018. Kenaikan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kenaikan pada dana perimbangan sebesar 6,10 persen dan lain-lain pendapatan yang sah sebesar 5,93 persen, sedangkan yang mengalami penurunan adalah pendapatan asli daerah turun sebesar 9,61 persen.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, sejak tahun 2001 transfer dana dari APBN ke daerah di alokasikan dalam bentuk *dana perimbangan*. Sebelumnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam APBN diwujudkan melalui alokasi pengeluaran transfer ke daerah berupa subsidi daerah otonom (SDO) dan anggaran bantuan pembangunan pusat dalam bentuk inpres. Dana perimbangan dari pemerintah pusat tahun 2018 diperkirakan mencapai 11,959 triliun rupiah lebih besar dari yang sebelumnya pada tahun 2017 yaitu sebesar 11,271 triliun rupiah. Dana perimbangan yang merupakan transfer dari pemerintah pusat. Pada tahun 2018 dana perimbangan naik 6,10 persen dibanding tahun 2017.

Mulai tahun 2012, struktur belanja pemerintah daerah berubah bukan lagi belanja publik dan aparatur tetapi menjadi belanja langsung dan tidak langsung. Perbedaan belanja langsung dan tak langsung terletak pada kaitan anggaran belanja dengan pelaksanaan program. Jika belanja tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program maka masuk sebagai belanja tak langsung. Sebaliknya, jika belanja terkait langsung dengan pelaksanaan program maka masuk sebagai belanja langsung. Berdasarkan struktur yang baru ini, di tahun 2018 terjadi kenaikan pada belanja tidak langsung sebesar 8,11 persen begitu juga belanja langsung naik sebesar 9,21 persen.

**Tabel a.**  
**Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran**  
**Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**  
**(ribu rupiah)**  
**2017 – 2018**

Rincian	2017	2018 *)	Perubahan (Persen)
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>18 755 948 034</b>	<b>18 562 622 675</b>	<b>-1,03</b>
<b><i>Pendapatan Daerah</i></b>	<b>16 182 547 340</b>	<b>16 846 359 330</b>	<b>4,10</b>
1. Pendapatan Asli Daerah	2 027 759 315	1 832 949 321	<b>-9,61</b>
2. Dana Perimbangan	11 271 674 530	11 959 404 383	<b>6,10</b>
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	2 883 113 495	3 054 005 626	<b>5,93</b>
<b><i>Pembiayaan Daerah</i></b>	<b>2 573 400 694</b>	<b>1 716 263 345</b>	<b>-33,31</b>
<b>PENGELUARAN DAERAH</b>	<b>18 755 948 034</b>	<b>18 562 622 675</b>	<b>-1,03</b>
<b><i>Belanja Tidak Langsung</i></b>	<b>8 520 950 655</b>	<b>9 212 396 985</b>	<b>8,11</b>
1. Belanja Pegawai	5 780 510 785	6 551 509 801	<b>13,34</b>
2. Belanja Bunga	-	1 252 827	<b>....</b>
3. Belanja Subsidi	10 306 189	6 428 000	<b>-37,63</b>
4. Belanja Hibah	320 089 255	309 561 491	<b>-3,29</b>
5. Belanja Bantuan Sosial	85 893 975	85 245 007	<b>-0,75</b>
6. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	31 195 824	30 417 255	<b>-2,50</b>
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	2 229 920 847	2 198 599 815	<b>-1,40</b>
8. Belanja Tidak Terduga	63 033 780	29 382 789	<b>-53,39</b>
<b><i>Belanja Langsung</i></b>	<b>8 377 884 003</b>	<b>9 149 742 276</b>	<b>9,21</b>
1. Belanja Pegawai	662 576 969	801 503 334	<b>20,97</b>
2. Belanja Barang dan Jasa	4 028 611 900	4 404 680 492	<b>9,33</b>
3. Belanja Modal	3 686 695 134	3 943 558 450	<b>6,97</b>
<b><i>Pembiayaan Daerah</i></b>	<b>1 857 113 376</b>	<b>200 483 414</b>	<b>-89,20</b>

\*) Data APBD

## 2.2. Penerimaan Daerah

Berbagai cara dilakukan pemerintah daerah kabupaten/kota untuk meningkatkan pendapatan daerahnya dalam upaya pemenuhan pembiayaan pelayanan publiknya. *Pertama*, pemerintah daerah kabupaten/kota memperoleh dana dari sumber-sumber yang dikategorikan Pendapatan Asli Daerah (PAD). *Kedua*, memperoleh transfer dana dari APBN yang di alokasikan dalam bentuk dana perimbangan yang terdiri dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, DAU, dan DAK. Pengalokasian dana perimbangan ini selain ditujukan untuk memberikan kepastian sumber pendanaan bagi APBD, juga bertujuan untuk mengurangi/memperkecil perbedaan kapasitas fiskal antar daerah. *Ketiga*, daerah memperoleh penerimaan dari sumber lainnya seperti bantuan dana kontijensi dan bantuan dana darurat.

Jika dilihat dari pendapatan daerah, tampak bahwa pada APBD 2018 diperkirakan akan mengalami kenaikan dari realisasi pendapatan seluruh pemerintah daerah kabupaten/kota tahun 2017, yaitu dari 16,182 triliun rupiah menjadi 16,848 triliun rupiah atau naik 4,10 persen.

### 2.2.1. Pendapatan Daerah

#### 2.2.1.1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus dioptimalkan peranannya agar mampu memberikan kompensasi kepada masyarakat berupa pelayanan yang baik dan perbaikan fasilitas umum. Jumlah dan kenaikan kontribusi PAD yang memadai akan menentukan tingkat kemandirian kabupaten/kota dalam pembangunan daerahnya sehingga tidak selalu tergantung pada bantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi. Salah satu langkah yang bisa ditempuh pemerintah daerah adalah memberikan kemudahan dalam investasi bagi sektor swasta sehingga akan tercipta pertumbuhan ekonomi yang ditimbulkan oleh tumbuhnya sektor swasta. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang kondusif juga akan menciptakan suasana yang aman dan nyaman untuk berinvestasi.

**Tabel b.**  
**Distribusi Realisasi Penerimaan**  
**Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**  
**Menurut Jenis Penerimaan**  
**(persen)**  
**2017 – 2018**

Jenis Penerimaan	2017	2018 *)
(1)	(2)	(3)
<b>PENERIMAAN DAERAH</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>86,28</b>	<b>90,75</b>
<b><i>Pendapatan Asli Daerah</i></b>	<b>10,81</b>	<b>9,87</b>
1. Pajak Daerah	3,36	3,05
2. Retribusi Daerah	0,60	0,65
3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	0,65	0,69
4. Lain-lain PAD yang sah	6,20	5,48
<b><i>Dana Perimbangan</i></b>	<b>60,10</b>	<b>64,43</b>
1. Bagi Hasil Pajak / Bukan Pajak	12,40	16,40
2. Dana Alokasi Umum (DAU)	36,41	36,97
3. Dana Alokasi Khusus (DAK)	11,29	11,06
<b><i>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</i></b>	<b>15,37</b>	<b>16,45</b>
<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>13,72</b>	<b>9,25</b>

\*) Data APBD

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2018 terhadap total penerimaan daerah diperkirakan akan mengalami penurunan dibanding tahun 2017 yaitu dari 10,81 persen menjadi 9,87 persen. Jika dilihat dari nilai nominalnya PAD mengalami penurunan yaitu dari 2,028 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 1,833 triliun rupiah pada tahun 2018 atau turun sebesar 9,61 persen. Penurunan tersebut terutama karena turunnya pajak daerah dari 630,48 miliar tahun 2017 menjadi 566,84 miliar tahun 2018 atau turun 10,09 persen, sedangkan lain-lain PAD yang sah turun 12,49 persen. Bila dilihat dari kontribusinya terhadap penerimaan daerah 3,05 persen disumbang dari pajak daerah, retribusi

daerah dan hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masing-masing sebesar 0,65 persen dan 0,69 persen. Sedangkan lain-lain PAD yang sah dengan kontribusi sebesar 5,48 persen.

### **2.2.1.2. Dana Perimbangan**

Dari tabel b dapat dilihat bahwa penerimaan pemerintah daerah kabupaten/kota kontribusi kenaikan terbesarnya disumbang dari dana perimbangan, dimana pada APBD 2018 kontribusinya diperkirakan sebesar 64,43 persen dari total penerimaan lebih besar dari kontribusi tahun 2017 yang mencapai 60,10 persen. Komponen penyumbang kenaikan terbesarnya adalah bagi hasil pajak / bukan pajak dengan kontribusi sebesar 16,40 persen dengan nilai nominal sebesar 3,044 triliun rupiah dan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 36,97 persen dengan nilai nominal sebesar 6,862 triliun. Sementara komponen Dana Alokasi Khusus (DAK) memberikan penurunan sebesar 11,06 persen dibanding dengan kontribusi tahun 2017 sebesar 11,29 persen dengan nilai nominal 2,053 triliun atau turun 3,06 persen.

### **2.2.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Penerimaan lain-lain pendapatan yang sah mengalami kenaikan dari 2,883 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 3,054 triliun rupiah pada tahun 2018 atau naik sebesar 5,93 persen. Kenaikan pendapatan ini juga menaikkan kontribusinya terhadap penerimaan dari 15,37 persen pada tahun 2017 menjadi 16,45 persen pada tahun 2018. Penerimaan lainnya ini terdiri dari pendapatan hibah, dana darurat, dana penyesuaian dan otonomi khusus yang merupakan dana dari APBN yang dialokasikan kepada daerah yang mengalami bencana nasional, peristiwa luar biasa/atau *crisis solvability* ditambah bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

## **2.2.2. Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, transfer dari dana cadangan, penerimaan pinjaman dan obligasi, dan hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Penerimaan pembiayaan daerah pada APBD 2018 diperkirakan mengalami penurunan dibandingkan pada realisasi APBD 2017 yaitu sebesar 2,573 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 1,716 triliun rupiah pada tahun 2018, atau turun sebesar 33,31 persen. Dengan penurunan secara nominal pada tahun 2018, maka kontribusi pembiayaan terhadap penerimaan mengalami penurunan dari 13,72 persen menjadi 9,25 persen.

### 2.3. Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah terdiri dari belanja tak langsung, belanja langsung, dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Belanja tak langsung meliputi bagian belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja tak langsung terdiri dari : belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang telah ditetapkan undang-undang, belanja bunga, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa, belanja bantuan keuangan, serta belanja tak tersangka. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program. Belanja langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal untuk melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah dan telah dianggarkan oleh pemerintah daerah.

Seperti halnya total penerimaan daerah, pada APBD 2018 total pengeluaran juga mengalami sedikit penurunan yaitu sebesar 1.03 persen dibanding tahun sebelumnya. Penurunan pengeluaran daerah di dominasi oleh naiknya belanja tidak langsung yaitu yang semula pada tahun 2017 hanya berkisar di 8,521 triliun rupiah maka pada tahun 2018 naik menjadi 9,212 triliun rupiah, atau naik sebanyak 8,11 persen. Begitu juga untuk belanja langsung pada tahun 2018 diperkirakan meningkat sebesar 9,21 persen dari tahun sebelumnya sebesar 8,378 triliun rupiah menjadi 9,150 triliun rupiah pada tahun 2018. Berbeda dengan pengeluaran daerah, Pembiayaan daerah pada tahun 2018 ini diharapkan dapat berhemat sebesar 89,20 persen dari tahun 2017, dimana pada tahun 2017 yang lalu pengeluaran pembiayaan daerah mencapai 1,857 triliyun rupiah namun di 2018 anggaran pengeluaran pembiayaan daerah diperkirakan hanya sebesar 200 miliar rupiah.

Dilihat dari kontribusinya, belanja tidak langsung memiliki kontribusi terbesar dalam pengeluaran daerah dengan kontribusi sebesar 49,63 persen pada tahun 2018. Sementara pada realisasi 2017, belanja tidak langsung memiliki kontribusi terbesar yaitu sebesar 45,43 persen. Ini berarti kontribusi belanja tidak langsung mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Selain itu kontribusi belanja langsung juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu dari 44,67 persen menjadi 49,29 persen.

**Tabel c.**  
**Distribusi Persentase Realisasi Pengeluaran**  
**Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota**  
**Menurut Jenis Pengeluaran**  
**(persen)**  
**2017 – 2018**

Jenis Pengeluaran	2017	2018 *
(1)	(2)	(3)
<b>Pengeluaran Daerah</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
<b><i>Belanja Tidak Langsung</i></b>	<b>45,43</b>	<b>49,63</b>
1. Belanja Pegawai	30,82	35,29
2. Belanja Bunga	-	0,01
3. Belanja Subsidi	0,05	0,03
4. Belanja Hibah	1,71	1,67
5. Belanja Bantuan Sosial	0,46	0,46
6. Belanja Bagi Hasil Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	0,17	0,16
7. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	11,89	11,84
8. Belanja Tidak Terduga	0,34	0,16
<b><i>Belanja Langsung</i></b>	<b>44,67</b>	<b>49,29</b>
1. Belanja Pegawai	3,53	4,32
2. Belanja Barang dan Jasa	21,48	23,73
3. Belanja Modal	19,66	21,24
<b><i>Pembiayaan Daerah</i></b>	<b>9,90</b>	<b>1,08</b>

\*)Data APBD

### 2.3.1. Belanja Tak Langsung

Dari sisi belanja tak langsung, terlihat bahwa distribusi persentase belanja pegawai menyumbangkan peranan yang paling besar terhadap total pengeluaran daerah yaitu sebesar 30,82 persen pada Tahun 2017 dan mengalami kenaikan menjadi 35,29 persen pada tahun 2018 dengan

nilai nominal sebesar 5,780 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 6,551 triliun rupiah pada tahun 2018.

### **2.3.2. Belanja Langsung**

Berbeda dengan belanja tak langsung, pada belanja langsung terlihat bahwa distribusi persentase belanja barang dan jasa menyumbangkan peranan yang paling besar terhadap total pengeluaran daerah yaitu sebesar 23,73 persen pada APBD 2018 dan mengalami kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, dengan nilai nominal sebesar 4,029 triliun rupiah pada tahun 2017 menjadi 4,405 triliun rupiah pada tahun 2018. Sedangkan kontribusi belanja langsung pada tahun 2018 ini yang terbesar setelah belanja barang dan jasa adalah belanja modal serta belanja pegawai masing-masing sebesar 21,24 persen dan 4,32 persen.

### **2.3.3. Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran pembiayaan daerah bersumber dari transfer ke dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran utang pokok yang jatuh tempo, dan sisa lebih perhitungan anggaran tahun berjalan. Pengeluaran pembiayaan daerah pada APBN 2018 diperkirakan mengalami penurunan, yaitu sebesar 1,857 triliun rupiah pada realisasi APBD 2017 menjadi 200 miliar rupiah pada APBD 2018 atau turun sebesar 89,20 persen.





# LAMPIRAN

<https://kassel.bps.go.id>



TABEL 1 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Jenis Penerimaan		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	16 182 547 340	16 846 359 330
1.	Pendapatan Asli Daerah	2 027 759 315	1 832 949 321
1.1	Pajak Daerah	630 477 060	566 838 719
1.2	Retribusi Daerah	113 101 112	121 097 188
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	121 147 701	127 304 520
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	1 163 033 442	1 017 708 894
2.	Dana Perimbangan	11 271 674 530	11 959 404 383
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2 325 449 577	3 044 195 173
2.2	Dana Alokasi Umum	6 828 303 122	6 862 077 156
2.3	Dana Alokasi Khusus	2 117 921 831	2 053 132 054
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	2 883 113 495	3 054 005 626
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	2 573 400 694	1 716 263 345
<b>JUMLAH / TOTAL</b>		<b>18 755 948 034</b>	<b>18 562 622 675</b>

\*) Data APBD

TABEL 2 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Jenis Pengeluaran		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>8 520 950 655</b>	<b>9 212 396 985</b>
1.	Belanja Pegawai	5 780 510 785	6 551 509 801
2.	Belanja Bunga	0	1 252 827
3.	Belanja Subsidi	10 306 189	6 428 000
4.	Belanja Hibah	320 089 255	309 561 491
5.	Belanja Bantuan Sosial	85 893 975	85 245 007
6.	Belanja Bagi Hasil	31 195 824	30 417 255
7.	Belanja Bantuan Keuangan	2 229 920 847	2 198 599 815
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	63 033 780	29 382 789
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>8 377 884 003</b>	<b>9 149 742 276</b>
1.	Belanja Pegawai	662 576 969	801 503 334
2.	Belanja Barang dan Jasa	4 028 611 900	4 404 680 492
3.	Belanja Modal	3 686 695 134	3 943 558 450
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>1 857 113 376</b>	<b>200 483 414</b>
<b>JUMLAH / TOTAL</b>		<b>18 755 948 034</b>	<b>18 562 622 675</b>

\*) Data APBD

TABEL 3 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Tanah Laut

Jenis Penerimaan		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 364 055 056</b>	<b>1 305 308 867</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah	187 174 984	126 409 456
1.1	Pajak Daerah	28 731 494	23 080 000
1.2	Retribusi Daerah	7 949 864	5 717 343
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11 247 397	11 247 397
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	139 246 229	86 364 716
2.	Dana Perimbangan	919 129 657	992 934 332
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	216 475 791	209 717 371
2.2	Dana Alokasi Umum	528 690 162	528 690 162
2.3	Dana Alokasi Khusus	173 963 704	254 526 799
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	257 750 415	185 965 079
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>695 373 802</b>	<b>256 460 858</b>
<b>JUMLAH / TOTAL</b>		<b>2 059 428 858</b>	<b>1 561 769 725</b>

\*) Data APBD

TABEL 4 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Tanah Laut

Jenis Pengeluaran		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>708 956 135</b>	<b>792 695 251</b>
1.	Belanja Pegawai	503 696 231	566 228 178
2.	Belanja Bunga	0	0
3.	Belanja Subsidi	0	0
4.	Belanja Hibah	21 450 815	47 390 676
5.	Belanja Bantuan Sosial	4 842 461	4 224 400
6.	Belanja Bagi Hasil	3 358 126	2 877 234
7.	Belanja Bantuan Keuangan	175 608 502	167 974 763
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	0	4 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>911 026 690</b>	<b>646 691 060</b>
1.	Belanja Pegawai	32 562 427	21 353 098
2.	Belanja Barang dan Jasa	369 374 041	322 732 920
3.	Belanja Modal	509 090 222	302 605 042
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>439 446 033</b>	<b>122 383 414</b>
<b>JUMLAH / TOTAL</b>		<b>2 059 428 858</b>	<b>1 561 769 725</b>

\*) Data APBD

TABEL 5 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Kota Baru

Jenis Penerimaan		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 378 614 174</b>	<b>1 811 936 266</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah	118 011 275	146 117 607
1.1	Pajak Daerah	42 882 280	43 334 641
1.2	Retribusi Daerah	4 974 832	5 940 803
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11 041 339	12 100 000
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	59 112 824	84 742 163
2.	Dana Perimbangan	1 111 335 401	1 425 979 389
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	214 237 797	485 003 784
2.2	Dana Alokasi Umum	597 207 951	612 929 409
2.3	Dana Alokasi Khusus	299 889 653	328 046 196
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	149 267 498	239 839 270
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>251 964 574</b>	<b>113 570 528</b>
<b>JUMLAH / TOTAL</b>		<b>1 630 578 748</b>	<b>1 925 506 794</b>

\*) Data APBD



TABEL 6 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Kota Baru

Kabupaten : Kota Baru		
Jenis Pengeluaran	2017	2018*)
(1)	(2)	(3)
<b>A. BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>759 862 280</b>	<b>819 029 787</b>
1. Belanja Pegawai	467 891 658	542 053 707
2. Belanja Bunga	0	0
3. Belanja Subsidi	0	0
4. Belanja Hibah	15 913 202	11 398 600
5. Belanja Bantuan Sosial	1 900 000	1 900 000
6. Belanja Bagi Hasil	5 349 972	5 350 000
7. Belanja Bantuan Keuangan	268 807 448	256 327 480
8. Pengeluaran Tidak Terduga	0	2 000 000
<b>B. BELANJA LANGSUNG</b>	<b>840 270 552</b>	<b>1 098 477 007</b>
1. Belanja Pegawai	114 894 838	145 294 225
2. Belanja Barang dan Jasa	461 315 533	472 849 760
3. Belanja Modal	264 060 181	480 333 022
<b>C. PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>30 445 916</b>	<b>8 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>	<b>1 630 578 748</b>	<b>1 925 506 794</b>

\*) Data APBD

TABEL 7 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Banjar

Jenis Penerimaan		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 629 599 468</b>	<b>1 541 457 148</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah	179 714 918	167 937 082
1.1	Pajak Daerah	66 632 375	49 080 796
1.2	Retribusi Daerah	7 183 346	7 840 825
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6 787 200	6 121 442
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	99 111 997	104 894 019
2.	Dana Perimbangan	1 074 257 385	1 014 034 222
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	142 528 808	168 438 156
2.2	Dana Alokasi Umum	709 407 411	709 407 411
2.3	Dana Alokasi Khusus	222 321 166	136 188 655
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	375 627 165	359 485 844
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>151 187 514</b>	<b>64 500 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 780 786 982</b>	<b>1 605 957 148</b>

\*) Data APBD

TABEL 8 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Banjar

Jenis Pengeluaran		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>922 323 921</b>	<b>979 903 987</b>
1.	Belanja Pegawai	569 977 367	667 054 827
2.	Belanja Bunga	0	0
3.	Belanja Subsidi	0	0
4.	Belanja Hibah	31 103 214	19 773 200
5.	Belanja Bantuan Sosial	5 627 610	5 924 075
6.	Belanja Bagi Hasil	5 734 659	5 692 162
7.	Belanja Bantuan Keuangan	309 881 071	278 959 723
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	0	2 500 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>732 211 727</b>	<b>626 053 161</b>
1.	Belanja Pegawai	106 365 962	148 258 139
2.	Belanja Barang dan Jasa	391 698 287	316 271 195
3.	Belanja Modal	234 147 478	161 523 827
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>126 251 334</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 780 786 982</b>	<b>1 605 957 148</b>

\*) Data APBD

TABEL 9 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Barito Kuala

Jenis Penerimaan		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 224 047 411</b>	<b>1 176 086 858</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah	92 134 311	65 000 000
1.1	Pajak Daerah	48 098 803	20 587 950
1.2	Retribusi Daerah	3 432 080	3 930 551
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7 006 028	9 203 000
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	33 597 400	31 278 499
2.	Dana Perimbangan	862 497 591	856 309 377
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	95 583 807	82 251 091
2.2	Dana Alokasi Umum	563 856 750	565 599 843
2.3	Dana Alokasi Khusus	203 057 034	208 458 443
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	269 415 509	254 777 481
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>73 687 088</b>	<b>26 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 297 734 499</b>	<b>1 202 086 858</b>

\*) Data APBD

TABEL 10 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Barito Kuala

Jenis Pengeluaran		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>693 948 084</b>	<b>691 935 967</b>
1.	Belanja Pegawai	451 297 640	472 331 479
2.	Belanja Bunga	0	0
3.	Belanja Subsidi	0	0
4.	Belanja Hibah	12 426 891	9 699 700
5.	Belanja Bantuan Sosial	9 774 150	8 301 650
6.	Belanja Bagi Hasil	3 981 752	2 329 258
7.	Belanja Bantuan Keuangan	216 078 691	198 273 880
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	388 960	1 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>459 324 679</b>	<b>499 150 891</b>
1.	Belanja Pegawai	15 245 915	13 075 420
2.	Belanja Barang dan Jasa	228 431 584	257 404 614
3.	Belanja Modal	215 647 180	228 670 857
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>144 461 736</b>	<b>11 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 297 734 499</b>	<b>1 202 086 858</b>

\*) Data APBD

TABEL 11 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Tapin

Jenis Penerimaan		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>996 124 550</b>	<b>1 123 648 313</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah	84 869 522	80 502 959
1.1	Pajak Daerah	18 143 603	15 005 000
1.2	Retribusi Daerah	3 175 353	3 135 063
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	5 585 203	5 585 203
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	57 965 363	56 777 693
2.	Dana Perimbangan	735 933 122	777 412 071
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	169 876 191	188 267 186
2.2	Dana Alokasi Umum	443 124 432	448 697 311
2.3	Dana Alokasi Khusus	122 932 499	140 447 574
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	175 321 906	265 733 283
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>67 851 571</b>	<b>106 029 638</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 063 976 121</b>	<b>1 229 677 951</b>

\*) Data APBD

TABEL 12 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Tapin

Jenis Pengeluaran		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>591 580 273</b>	<b>611 438 593</b>
1.	Belanja Pegawai	386 051 407	415 913 542
2.	Belanja Bunga	0	0
3.	Belanja Subsidi	0	0
4.	Belanja Hibah	40 228 506	34 376 093
5.	Belanja Bantuan Sosial	3 088 800	3 509 180
6.	Belanja Bagi Hasil	1 532 180	1 814 006
7.	Belanja Bantuan Keuangan	160 121 192	153 005 811
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	558 188	2 819 961
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>456 411 032</b>	<b>616 639 358</b>
1.	Belanja Pegawai	27 814 892	30 838 146
2.	Belanja Barang dan Jasa	235 117 822	325 446 729
3.	Belanja Modal	193 478 318	260 354 483
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>15 984 816</b>	<b>1 600 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 063 976 121</b>	<b>1 229 677 951</b>

\*) Data APBD

TABEL 13 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Hulu Sungai Selatan

Jenis Penerimaan		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 143 549 115</b>	<b>1 178 423 954</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah	142 495 390	127 879 788
1.1	Pajak Daerah	11 313 216	9 630 273
1.2	Retribusi Daerah	9 799 649	9 465 374
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6 920 130	7 004 500
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	114 462 395	101 779 641
2.	Dana Perimbangan	819 334 317	851 817 843
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	147 858 503	152 690 705
2.2	Dana Alokasi Umum	522 814 008	532 162 390
2.3	Dana Alokasi Khusus	148 661 806	166 964 748
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	181 719 408	198 726 323
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>195 304 558</b>	<b>135 216 211</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 338 853 673</b>	<b>1 313 640 165</b>

\*) Data APBD



TABEL 14 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Hulu Sungai Selatan

Jenis Pengeluaran		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>679 929 055</b>	<b>736 256 853</b>
1.	Belanja Pegawai	445 081 858	501 098 662
2.	Belanja Bunga	0	0
3.	Belanja Subsidi	3 945 384	4 428 000
4.	Belanja Hibah	22 108 510	26 500 000
5.	Belanja Bantuan Sosial	28 895 189	19 850 513
6.	Belanja Bagi Hasil	1 962 372	1 910 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan	117 935 742	180 469 678
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	60 000 000	2 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>525 408 256</b>	<b>577 383 312</b>
1.	Belanja Pegawai	30 834 914	43 783 731
2.	Belanja Barang dan Jasa	258 044 234	283 401 143
3.	Belanja Modal	236 529 108	250 198 438
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>133 516 362</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 338 853 673</b>	<b>1 313 640 165</b>

\*) Data APBD

TABEL 15 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Hulu Sungai Tengah

Jenis Penerimaan		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 125 165 680</b>	<b>1 198 332 104</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah	118 421 755	<b>157 084 285</b>
1.1	Pajak Daerah	12 083 082	12 463 142
1.2	Retribusi Daerah	11 311 663	7 588 288
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7 310 809	12 500 000
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	87 716 201	124 532 855
2.	Dana Perimbangan	770 217 653	808 410 922
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	94 262 789	106 151 664
2.2	Dana Alokasi Umum	519 741 516	519 741 516
2.3	Dana Alokasi Khusus	156 213 348	182 517 742
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	236 526 272	232 836 897
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>62 097 332</b>	<b>364 189 735</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 187 263 012</b>	<b>1 562 521 839</b>

\*) Data APBD

TABEL 16 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Hulu Sungai Tengah

Jenis Pengeluaran		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>626 361 458</b>	<b>683 893 111</b>
1.	Belanja Pegawai	417 456 296	480 849 240
2.	Belanja Bunga	0	0
3.	Belanja Subsidi	0	0
4.	Belanja Hibah	9 630 808	8 495 460
5.	Belanja Bantuan Sosial	12 690 050	14 489 822
6.	Belanja Bagi Hasil	763 159	1 998 600
7.	Belanja Bantuan Keuangan	185 617 145	176 059 989
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	204 000	2 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>549 614 315</b>	<b>868 628 728</b>
1.	Belanja Pegawai	18 066 051	22 359 933
2.	Belanja Barang dan Jasa	206 846 171	269 756 870
3.	Belanja Modal	324 702 093	576 511 925
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>11 287 239</b>	<b>10 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 187 263 012</b>	<b>1 562 521 839</b>

\*) Data APBD

TABEL 17 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Hulu Sungai Utara

Jenis Penerimaan		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 082 500 350</b>	<b>903 607 429</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah	131 552 357	104 000 000
1.1	Pajak Daerah	9 774 499	7 450 187
1.2	Retribusi Daerah	8 073 215	10 362 152
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11 259 600	10 874 700
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	102 445 043	75 312 961
2.	Dana Perimbangan	725 616 562	590 327 662
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	93 792 195	105 265 377
2.2	Dana Alokasi Umum	483 674 063	485 062 285
2.3	Dana Alokasi Khusus	148 150 304	0
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	225 331 431	209 279 767
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>218 640 459</b>	<b>96 181 110</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 301 140 809</b>	<b>999 788 539</b>

\*) Data APBD

TABEL 18 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Hulu Sungai Utara

Jenis Pengeluaran		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>638 947 940</b>	<b>629 680 653</b>
1.	Belanja Pegawai	398 779 334	407 491 785
2.	Belanja Bunga	0	0
3.	Belanja Subsidi	0	0
4.	Belanja Hibah	13 699 700	2 788 100
5.	Belanja Bantuan Sosial	4 595 700	4 485 750
6.	Belanja Bagi Hasil	1 565 965	1 581 234
7.	Belanja Bantuan Keuangan	220 307 241	210 333 784
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	0	3 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>486 551 222</b>	<b>370 107 886</b>
1.	Belanja Pegawai	29 944 857	36 459 002
2.	Belanja Barang dan Jasa	226 040 425	239 489 953
3.	Belanja Modal	230 565 940	94 158 931
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>175 641 647</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 301 140 809</b>	<b>999 788 539</b>

\*) Data APBD

TABEL 19 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Tabalong

Jenis Penerimaan		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 308 522 644</b>	<b>1 391 185 295</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah	180 405 276	166 268 005
1.1	Pajak Daerah	56 081 957	50 555 700
1.2	Retribusi Daerah	6 292 894	6 664 553
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	11 222 053	12 000 000
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	106 808 372	97 047 752
2.	Dana Perimbangan	916 281 486	982 168 025
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	256 074 346	407 652 652
2.2	Dana Alokasi Umum	494 109 854	494 109 854
2.3	Dana Alokasi Khusus	166 097 286	80 405 519
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	211 835 882	242 749 265
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>274 642 767</b>	<b>104 486 405</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 583 165 411</b>	<b>1 495 671 700</b>

\*) Data APBD

TABEL 20 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Tabalong

Jenis Pengeluaran		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>700 905 608</b>	<b>782 295 617</b>
1.	Belanja Pegawai	452 022 271	508 018 272
2.	Belanja Bunga	0	0
3.	Belanja Subsidi	4 481 605	0
4.	Belanja Hibah	53 220 084	64 211 586
5.	Belanja Bantuan Sosial	8 289 075	13 081 617
6.	Belanja Bagi Hasil	6 065 143	5 974 000
7.	Belanja Bantuan Keuangan	176 827 430	185 947 314
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	0	5 062 828
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>739 349 700</b>	<b>713 376 083</b>
1.	Belanja Pegawai	52 435 401	80 012 444
2.	Belanja Barang dan Jasa	288 007 006	293 509 712
3.	Belanja Modal	398 907 293	339 853 927
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>142 910 103</b>	<b>0</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 583 165 411</b>	<b>1 495 671 700</b>

\*) Data APBD

TABEL 21 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Tanah Bumbu

Jenis Penerimaan		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 326 169 151</b>	<b>1 414 107 874</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah	149 588 783	180 432 550
1.1	Pajak Daerah	38 194 013	52 736 974
1.2	Retribusi Daerah	8 971 926	15 910 815
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3 055 036	3 555 036
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	99 367 808	108 229 725
2.	Dana Perimbangan	858 257 748	934 383 010
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	319 062 059	379 350 211
2.2	Dana Alokasi Umum	457 712 799	457 712 799
2.3	Dana Alokasi Khusus	81 482 890	97 320 000
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	318 322 620	299 292 314
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>101 174 922</b>	<b>101 174 922</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 427 344 073</b>	<b>1 515 282 796</b>

\*) Data APBD



TABEL 22 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Tanah Bumbu

Jenis Pengeluaran		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>640 229 120</b>	<b>690 677 695</b>
1.	Belanja Pegawai	420 393 162	462 314 085
2.	Belanja Bunga	0	0
3.	Belanja Subsidi	0	0
4.	Belanja Hibah	26 902 789	30 873 660
5.	Belanja Bantuan Sosial	379 190	1 000 000
6.	Belanja Bagi Hasil	0	0
7.	Belanja Bantuan Keuangan	191 310 072	194 489 950
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	1 243 907	2 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>675 640 987</b>	<b>814 605 101</b>
1.	Belanja Pegawai	150 014 174	158 277 435
2.	Belanja Barang dan Jasa	307 559 265	394 486 135
3.	Belanja Modal	218 067 548	261 841 531
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>111 473 966</b>	<b>10 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 427 344 073</b>	<b>1 515 282 796</b>

\*) Data APBD

TABEL 23 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Balangan

Jenis Penerimaan		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 112 190 405</b>	<b>1 268 858 412</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah	87 849 236	56 116 624
1.1	Pajak Daerah	10 910 154	7 191 000
1.2	Retribusi Daerah	1 919 401	1 662 340
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	14 609 203	15 400 600
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	60 410 478	31 862 684
2.	Dana Perimbangan	839 890 957	1 011 591 194
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	347 566 281	505 023 932
2.2	Dana Alokasi Umum	382 593 322	382 593 322
2.3	Dana Alokasi Khusus	109 731 354	123 973 940
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	184 450 212	201 150 594
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>240 730 088</b>	<b>195 053 391</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 352 920 493</b>	<b>1 463 911 803</b>

\*) Data APBD

TABEL 24 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kabupaten : Balangan

Jenis Pengeluaran		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>546 569 091</b>	<b>609 271 244</b>
1.	Belanja Pegawai	321 494 781	384 833 034
2.	Belanja Bunga	0	0
3.	Belanja Subsidi	0	0
4.	Belanja Hibah	23 203 705	20 964 050
5.	Belanja Bantuan Sosial	4 081 900	6 948 000
6.	Belanja Bagi Hasil	882 496	890 761
7.	Belanja Bantuan Keuangan	196 906 209	194 635 399
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	0	1 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>707 114 246</b>	<b>839 640 559</b>
1.	Belanja Pegawai	20 839 749	30 145 190
2.	Belanja Barang dan Jasa	358 989 191	464 698 886
3.	Belanja Modal	327 285 306	344 796 483
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>99 237 156</b>	<b>15 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 352 920 493</b>	<b>1 463 911 803</b>

\*) Data APBD

TABEL 25 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kota : Banjarmasin

Jenis Penerimaan		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 481 114 231</b>	<b>1 543 240 284</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah	324 977 988	266 950 965
1.1	Pajak Daerah	180 620 391	171 557 782
1.2	Retribusi Daerah	31 719 902	31 906 571
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	18 416 061	15 025 000
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	94 221 634	48 461 612
2.	Dana Perimbangan	992 961 482	1 020 730 948
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	130 814 731	150 108 555
2.2	Dana Alokasi Umum	696 828 787	696 828 787
2.3	Dana Alokasi Khusus	165 317 964	173 793 606
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	163 174 761	255 558 371
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>123 881 127</b>	<b>92 749 920</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 604 995 358</b>	<b>1 635 990 204</b>

\*) Data APBD

TABEL 26 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kota : Banjarmasin

Jenis Pengeluaran		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>631 693 357</b>	<b>760 771 045</b>
1.	Belanja Pegawai	585 997 404	739 278 704
2.	Belanja Bunga	0	0
3.	Belanja Subsidi	0	0
4.	Belanja Hibah	35 732 884	19 236 297
5.	Belanja Bantuan Sosial	489 500	180 000
6.	Belanja Bagi Hasil	0	0
7.	Belanja Bantuan Keuangan	9 358 844	1 076 044
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	114 725	1 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>683 363 094</b>	<b>860 219 159</b>
1.	Belanja Pegawai	33 888 618	33 973 538
2.	Belanja Barang dan Jasa	422 407 147	496 554 288
3.	Belanja Modal	227 067 329	329 691 333
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>289 938 907</b>	<b>15 000 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 604 995 358</b>	<b>1 635 990 204</b>

\*) Data APBD

TABEL 27 REALISASI PENERIMAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kota : Banjar Baru

Jenis Penerimaan		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>1 010 895 105</b>	<b>990 166 526</b>
1.	Pendapatan Asli Daerah	230 563 520	188 250 000
1.1	Pajak Daerah	107 011 193	104 165 274
1.2	Retribusi Daerah	8 296 987	10 972 510
1.3	Hasil Perusahaan Milik Daerah & Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	6 687 642	6 687 642
1.4	Lain-lain PAD yang Sah	108 567 698	66 424 574
2.	Dana Perimbangan	645 961 169	693 305 388
2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	97 316 279	104 274 489
2.2	Dana Alokasi Umum	428 542 067	428 542 067
2.3	Dana Alokasi Khusus	120 102 823	160 488 832
3.	Lain-lain Pendapatan yang Sah	134 370 416	108 611 138
<b>B.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>116 864 892</b>	<b>60 650 627</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 127 759 997</b>	<b>1 050 817 153</b>

\*) Data APBD

TABEL 28 REALISASI PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA  
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
 2017 – 2018  
 (ribu rupiah)

Kota : Banjar Baru

Jenis Pengeluaran		2017	2018 *)
(1)		(2)	(3)
<b>A.</b>	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>379 644 333</b>	<b>424 547 182</b>
1.	Belanja Pegawai	360 371 376	404 044 286
2.	Belanja Bunga	0	1 252 827
3.	Belanja Subsidi	1 879 200	2 000 000
4.	Belanja Hibah	14 468 147	13 854 069
5.	Belanja Bantuan Sosial	1 240 350	1 350 000
6.	Belanja Bagi Hasil	0	0
7.	Belanja Bantuan Keuangan	1 161 260	1 046 000
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	524 000	1 000 000
<b>B.</b>	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>611 597 503</b>	<b>618 769 971</b>
1.	Belanja Pegawai	29 669 171	37 673 033
2.	Belanja Barang dan Jasa	274 781 194	268 078 287
3.	Belanja Modal	307 147 138	313 018 651
<b>C.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>136 518 161</b>	<b>7 500 000</b>
<b>JUMLAH/TOTAL</b>		<b>1 127 759 997</b>	<b>1 050 817 153</b>

\*) Data APBD



Sensus  
Penduduk  
2020

# DATA

## MENCERDASKAN BANGSA

<https://kssel.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**  
Jl. Soekarno-Hatta (Jalur Trikora) No. 7 Banjarbaru 70713  
Telp. (0511) 6749001, Fax. (0511) 6749106  
Email: bps6300@bps.go.id

ISSN 2460-3031



9 772460 303007